



**PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

**AKTUALISASI KEHIDUPAN
BERBANGSA DAN BERNEGARA
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2022**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun publikasi Aktualisasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Kabupaten Karanganyar Tahun 2022.

Publikasi yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar ini memiliki tujuan agar diperoleh gambaran mengenai bagaimana masyarakat memahami empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Gambaran tersebut didapatkan secara langsung dari kegiatan Survei Empat Pilar yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar pada tahun anggaran 2022. Publikasi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga kritik dan saran serta koreksi dalam rangka perbaikan dalam penyusunannya ini sangat kami harapkan.

Demikian publikasi Aktualisasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 ini kami susun sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan tahun berikutnya. Semoga bermanfaat.

Karanganyar, Desember 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Karanganyar



BAMBANG SUTARMANTO, S.Sos., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650329 198703 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Pelaksanaan Survei	1
1.3. Maksud dan Tujuan	1
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	3
2.1. Pancasila	3
2.2. Wawasan Kebangsaan	5
2.3. Masyarakat	7
2.4. Kajian Indeks Pancasila	7
BAB III. PENGUMPULAN DATA SURVEI	9
3.1. Pelaksanaan Survei	9
3.2. Metode Pengumpulan Data	9
3.3. Lokasi Pengumpulan Data	9
3.4. Waktu Pelaksanaan	9
3.5. Penentuan Jumlah Responden	10
BAB IV. HASIL PENGOLAHAN DATA SURVEI	11
4.1. Karakteristik Responden	11
4.2. Indeks Survei (Per Pilar)	12
BAB V. ANALISIS HASIL SURVEI	13
5.1. Analisis Hasil Olah Data	13
5.2. Rencana Tindak Lanjut	13
BAB VI. PENUTUP	15
LAMPIRAN	16
1. Kuesioner	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia memiliki 4 (empat) pilar yang menjadi dasar dalam membangun bangsa dan negara pada saat ini dan yang akan datang. Empat pilar yang dimaksud adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar yang dalam hal ini terkait bidang urusan persatuan bangsa, memiliki tanggung jawab yaitu melaksanakan kegiatan Sosialisasi 4 (Empat) Pilar agar semakin meningkat pemahaman masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Kemudian dari kegiatan Sosialisasi 4 (Empat) Pilar tersebut akan dilaksanakan survei yang bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat dalam aktualisasinya. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar agar pemahaman tentang 4 (Empat) Pilar ini dapat dicapai. Dengan tercapainya pemahaman yang baik ini, diharapkan masyarakat akan semakin cinta terhadap negara, tanah air, dan bangsa.

1.2. Dasar Pelaksanaan Survei Empat Pilar

- Mandat MPR RI agar terus melaksanakan sosialisasi 4 (Empat) Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya publikasi ini adalah untuk memberikan gambaran sudah sejauh mana aktualisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Kabupaten Karanganyar.

Publikasi ini merupakan output dari penyelenggaraan Survei Empat Pilar yang sebelumnya sudah didahului dengan kegiatan sosialisasi Empat Pilar kepada warga Kabupaten Karanganyar. Sosialisasi tersebut diharapkan menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan dan rasa

nasionalisme sesuai semangat Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 1945. Tujuan pelaksanaan adalah untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pancasila

Sejak disahkan secara konstitusional pada 18 Agustus 1945, Pancasila berkedudukan sebagai dasar (falsafah) negara, pandangan hidup, ideologi nasional, dan ligatur (pemersatu) dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai pondasi dasar statis yang mempersatukan seluruh elemen masyarakat Indonesia sekaligus bintang penuntun (Leitsar) yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Pada posisi seperti ini Pancasila merupakan sumber dari jati diri masyarakat Indonesia, kepribadian, moralitas dan perlindungan terkait hak dan kewajiban warga negaranya. Dalam proses perumusannya setiap fase konseptualisasi Pancasila melibatkan partisipasi dari semua unsur dan golongan yang ada di masyarakat, oleh sebab itu Pancasila disebut sebagai karya bersama milik bangsa ini. Dengan demikian, bagi masyarakat Indonesia Pancasila merupakan landasan moralitas dan haluan yang jelas dan visioner yang dibentuk secara bersama-sama.

Latief Yudi (2015) mengemukakan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam Pancasila dapat dilukiskan sebagai berikut:

1. *Pertama*, menurut alam Pancasila, nilai-nilai ketuhanan (religiositas) dijadikan sebagai sumber etika dan spiritualitas yang dianggap penting sebagai fundamental etik kehidupan bernegara. Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan multiagama dan multikeyakinan, negara Indonesia dapat diharapkan dapat mengambil jarak yang sama terhadap semua agama/keyakinan, melindungi semua agama/keyakinan, dan dari dikte-dikte.
2. *Kedua*, menurut alam Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam dan sifat-sifat sosial manusia. Komitmen bangsa Indonesia dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan sangat visioner. Secara teoritik-komparatif, jalan eksternalisasi dan internasionalisasi dalam mengembangka kemausiaan secara adil dan beradab itu mendapatkan voso Indonesia dalam perbandingan antara perspektif idealisme politik dan realisme politik.

3. *Ketiga*, menurut alam pemikiran Pancasila, persatuan dari kebhinekaan masyarakat Indonesia dikelola berdasarkan konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan keragaman, dan keberagaman dalam persatuan yang salam slogan negara dinyatakan dengan ungkapan “Bhinneka Tunggal Ika”
4. *Keempat*, menurut alam pikiran Pancasila, aktualisasi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Gagasan demokrasi permusyawaratan ala Indonesia yang menekankan konsesus dan menyelaraskan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.
5. *Kelima*, menurut alam pikiran Pancasila, wujud dari semua diatas adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Beberapa pertanyaan muncul saat ini mengenai masih relevankah nilai Pancasila sampai saat ini? Jawabannya adalah iya, Pancasila merupakan ideologi tahan banting yang justru semakin relevan dengan keadaan globalisasi saat ini. Hal ini disebabkan karena para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila memuat nilai-nilai yang luas, sehingga dapat mudah digunakan dalam situasi apapun termasuk dalam kemajuan zaman saat ini. Maharani Dwi P dkk (2019) dalam Jurnal Ketahanan Nasional UGM mengemukakan bahwa Pancasila memiliki ciri sebagai ideologi terbuka, yang berarti nilai-nilai Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan jaman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara ringkas Pancasila memiliki kedudukan dan fungsi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, seperti:

- a. Pancasila sebagai pandangan hidup

Pancasila dijadikan sebagai dasar kepercayaan masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bertingkah laku, bersikap, dan berfikir. Nilai-nilai Pancasila menggambarkan rasa kekeluargaan yang kuat antar masyarakat yang tersusun didasarkan pada silih asih, asah, dan silih asuh. Selain itu, Pancasila merupakan dasar moral atau kebudayaan masyarakat Indonesia.

- b. Pancasila sebagai dasar negara

Pancasila merupakan perwujudan serangkaian nilai yang digali langsung dari masyarakat Indonesia dan tumbuh berkembang sejak berabad yang lalu, dimana memuat gagasan tentang cita-cita dan tujuan negara dalam

konteks hukum yang terwujud dalam pasal-pasal. Adapun perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dapat terlihat dari pembukaan UUD NRI 1945 serta pasal-pasal nya.

c. Pancasila sebagai Ideologi Nasional

Nilai-nilai Pancasila merupakan gagasan, nilai-nilai dan keyakinan yang menyeluruh dan sistematis dalam mengatur tingkah laku seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka artinya lima sila Pancasila dapat diaplikasikan pada semua kondisi dan perkembangan jaman. Peran Pancasila sebagai ideologi nasional sangatlah penting terutama dalam usaha mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia.

2.2 Wawasan Kebangsaan

Nilai wawasan kebangsaan lahir pada saat masyarakat Indonesia sedang berjuang membebaskan diri dari penjajah untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Awalnya perjuangan tersebut hanya dilaksanakan pada kelompok tertentu tidak berskala nasional, sehingga hasil yang didapatkan tidak terlalu maksimal. Namun perjuangan tersebut terus dilakukan oleh masyarakat Indonesia tanpa henti, sampai pada munculnya organisasi pertama yang berskala nasional bernama Budi Utomo yang terbentuk pada tanggal 20 Mei 1908. Tekad dan perjuangan itu lebih tegas lagi dengan adanya Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 kemudian mencapai satu tonggak sejarah, bersatu pada memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Selama perjalanan perjuangan diatas tanpa disadari munculnya gagasan, sikap, dan tekad yang sama pada seluruh masyarakat Indonesia bersumber pada nilai-nilai budaya bangsa serta cita-cita, moral rakyat Indonesia. Sikap dan gagasan tersebut pengejawatan dari suatu wawasan kebangsaan itu sendiri.

Prof. Muladi, Gubernur (Lemhannas RI 2005-2011) menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suhady dan Sinaga (2006) menjelaskan bahwa wawasan kebangsaan sangat identik dengan wawasan nusantara yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan negara. Apabila seluruh masyarakat Indonesia memiliki cara pandang yang sama dalam hal ini adalah wawasan kebangsaan, maka akan terwujud integrasi

nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Kesatuan disini bukan hanya berkaitan dengan budaya saja, tetapi bersatu dalam semua bidang kehidupan di Indonesia. Adapun dasar dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berdasar pada falsafah bangsa yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebagai landasar konstitusional. Wawasan kebangsaan memiliki enam dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental bagi masyarakat Indonesia (<https://kesbangpol.bantenprov.go.id/>) sebagai berikut:

1. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa;
2. Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu;
3. Cinta akan tanah air dan bangsa;
4. Demokrasi atau kedaulatan rakyat;
5. Kesetiakawanan sosial;
6. Masyarakat adil-makmur;

Selain memiliki enam nilai dasar diatas wawasan kebangsaan terbagi menjadi tiga unsur yakni wadah, isi, dan tata laku. Wawasan nusantara diartikan sebagai wadah karena tempat masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan corak kebudayaan dan kekayaan alam guna memenuhi segala kehidupannya. Sedangkan isi artinya, masyarakat Indonesia secara bersama-sama berkembang dan menggapai cita-cita serta tujuan nasional. Dalam proses mencapai cita-cita dan tujuan akan tercermin tata laku dalam bermasyarakat. Unsur-unsur diatas dapat terlaksana dengan baik apabila masyarakat Indonesia dapat mematuhi dan mentaati asas-asas wawasan nusantara sebagai berikut:

1. Kepentingan/Tujuan yang sama
2. Solidaritas
3. Keadilan
4. Kerjasama
5. Kejujuran
6. Kesetiaan terhadap kesepakatan

2.3. Masyarakat

Shadily (1999) mendefinisikan masyarakat sebagai golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karea sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. Sedangkan Selo

Sumardjan mendefinisikan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersana dan menghasilkan kebudayaan. Suatu masyarakat terbentuk atas beberapa hal:

- a. Masyarakat Paksaan, umpamanya negara, masyarakat tawanan ditempat tawanan, masyarakat pengungsi atau pelarian dan sebagainya. Ke dalam (kelompoknya) bersifat Gemeinschaft ke luar bersifat Gesseschaft.
- b. Masyarakat merdeka yang terbagi menjadi dua hal:
 - i. Masyarakat alam yaitu yang terjadi dengan sendirinya: suku-golongan atau suku, yang bertalian karena daerah atau keturunan, umumnya yang masih sederhana sekali kebudayaanya dalam keadaan terpencil atau tak mudah berhubungan dengan dunia terpencil atau tak mudah berhubungan dengan dunia luar. Umumnya bersifat Gemeinschaft
 - ii. Masyarakat budidaya, terdiri karena kepentingan keduniaan atau kepercayaan (agama), yaitu antara lain kongsi perekonomian, koperasi, gereja dan sebainya. Umumnya bersifat Gesellschaft.

Suatu golongan manusia dapat dikatakan masyarakat apabila memenuhi beberapa unsur-unsur dibawah ini:

- a. Suatu golongan manusia dapat dikatakan masyarakat apabila hidup secara bersama-sama
- b. Bercampur dalam waktu yang lama
- c. Memiliki tujuan bersama atau memiliki kesamaan ideologi
- d. Hidup dalam satu sistem yang sama.

2.4. Kajian Indeks Pancasila

Permasalahan ketahanan ideologi saat ini mengalami pasang surut, hal tersebut dapat terlihat dari munculnya berbagai macam permasalahan yang dapat mengancam keutuhanan dan ketahanan bangsa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan hubungan antara ideologi Pancasila dan ketahanan merupakan dua hal yang tidak bisa di pisahkan satu sama lain. Suryahadiprojo (1997:14) dalam Maharani Dwi S dkk (2019) dalam Jurnal Ketahanan Nasional UGM menjelaskan ketahanan nasional adalah kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik itu yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan dan cita-cita nasional. Salah satu aspek terpenting dalam ketahanan nasional adalah ketahanan ideologi Pancasila.

Suryosumarto (1997: 34) dalam Jurnal Ketahanan Nasional UGM menjelaskan bahwa ketahanan nasional mengandung prinsip dasar pengejawantahan Pancasila dalam segenap aspek kehidupan nasional. Saat ini yang menjadi tantangan bersama dalam ketahanan Ideologi Pancasila adalah kecanggihan teknologi. Perkembangan teknologi membawa dampak yang luar biasa, kehidupan masyarakat saat ini tidak bisa dilepaskan dari media sosial. Pada dasarnya media masa biasanya mengedepankan bisnis dan keuntungan saja, tanpa melihat sisi moralitas. Berita yang muncul di media masa setiap harinya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti: bullying, berita hoax, intoleransi dan sebagainya. Realitas semacam ini dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya penguatan ketahanan ideologi Pancasila di masyarakat.

Faktor kekuatan ketahanan Ideologi berasal dari nilai-nilai kearifan lokal yang masih berkembang dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dibawah ini adalah contoh indeks ketahanan ideologi Pancasila pada beberapa kota besar di Indonesia:

Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila pada 9 (Sembilan) Provinsi

No	Provinsi	Nilai	Kategori
1.	Papua Barat	238,45	Rendah
2.	Maluku	268,16	Sedang
3.	NTT	288,41	Tinggi
4.	Bali	267,61	Sedang
5.	Sulawesi Selatan	281,73	Sedang
6.	Kalimantan Barat	261,74	Sedang
7.	DIY	285,47	Tinggi
8.	DKI Jakarta	258,03	Rendah
9.	Sumatera Utara	261,57	Sedang

Sumber: Septiana, dkk (2018)

BAB III

PENGUMPULAN DATA SURVEI

3.1. Pelaksana Survei Empat Pilar

Survei ini dilakukan secara mandiri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Empat Pilar.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan survei menggunakan kuesioner dengan memanfaatkan *Google Form* yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 60 pertanyaan yang terbagi atas:

1. Pancasila : 15 butir pertanyaan
2. UUD 1945 : 15 butir pertanyaan
3. NKRI : 15 butir pertanyaan
4. Bhinneka Tunggal Ika : 15 butir pertanyaan

3.3. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

Lokasi pengumpulan data di 17 (tujuh belas) kecamatan di Kabupaten Karanganyar. Dan waktu pengumpulan data dilakukan mulai 1 September – 30 Nopember Tahun 2022. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden menggunakan *gadget*. Dengan cara ini objek survei dapat mengisi kuisisioner dimana saja dan kapan saja.

3.4. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 3 (tiga) bulan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Agustus 2022	10
2.	Pengumpulan data	September – Nopember 2022	60
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Desember 2022	5
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Desember 2022	10

3.5. Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi objek survei dari peserta yang ikut sosialisasi yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar. Jika dilihat dari total jumlah peserta tahun 2022, maka sampel peserta sosialisasi dalam kurun waktu satu tahun adalah sebanyak 100 orang. Selanjutnya responden dipilih secara *purposive* dari daftar kontak yang sudah tersedia. Kontak-kontak tersebut dapat menyebarkan kuesioner kepada responden yang lain yang dikenalnya.

Berikut adalah penentuan jumlah sampel yang paling minimal berdasarkan jumlah populasi yang ada.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

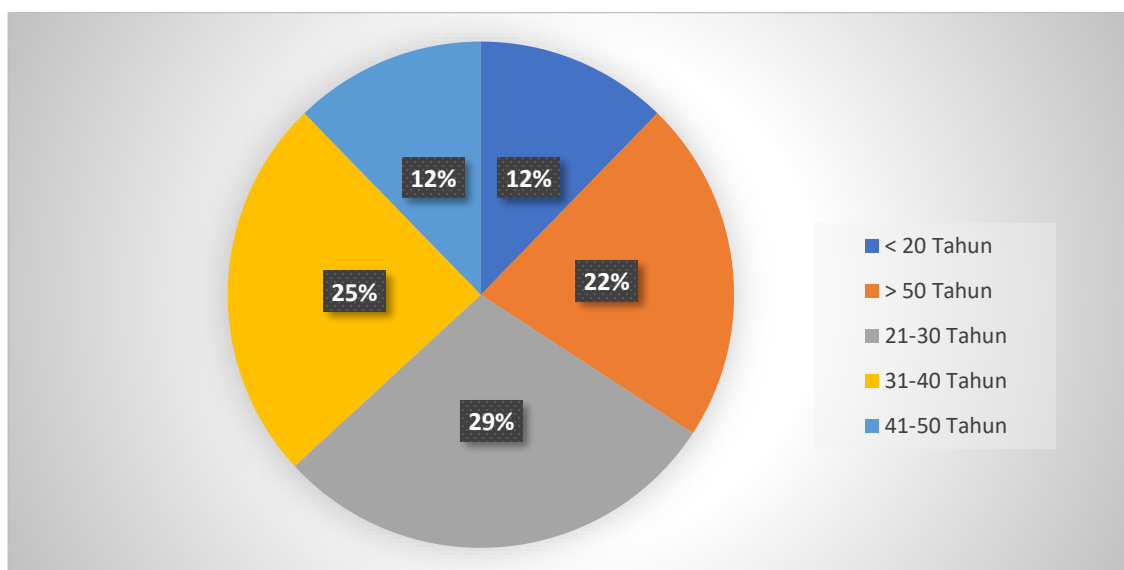
BAB IV HASIL PENGOLAHAN DATA SURVEI

4.1. Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 114 orang responden, dengan karakteristik sebagai berikut:

A. Kelompok Umur

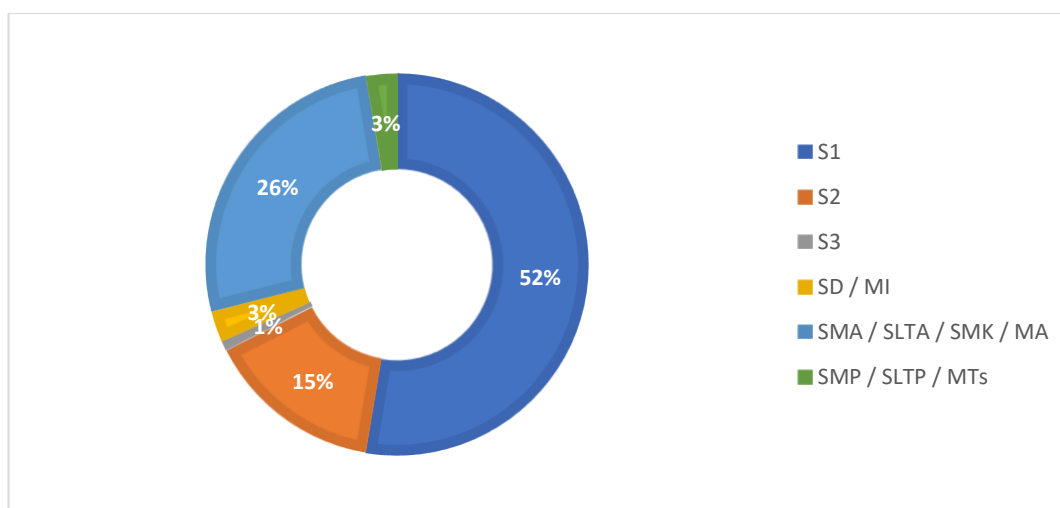
Responden Menurut Kelompok Umur



Menurut kelompok umur, sebagian besar responden berada pada rentang usia muda, yaitu kelompok umur 21 s.d. 30 tahun sebanyak 29 persen. Persebaran menurut kelompok umur tidak terlalu timpang, karena tidak ada yang menonjol hingga lima puluh persen.

B. Tingkat Pendidikan

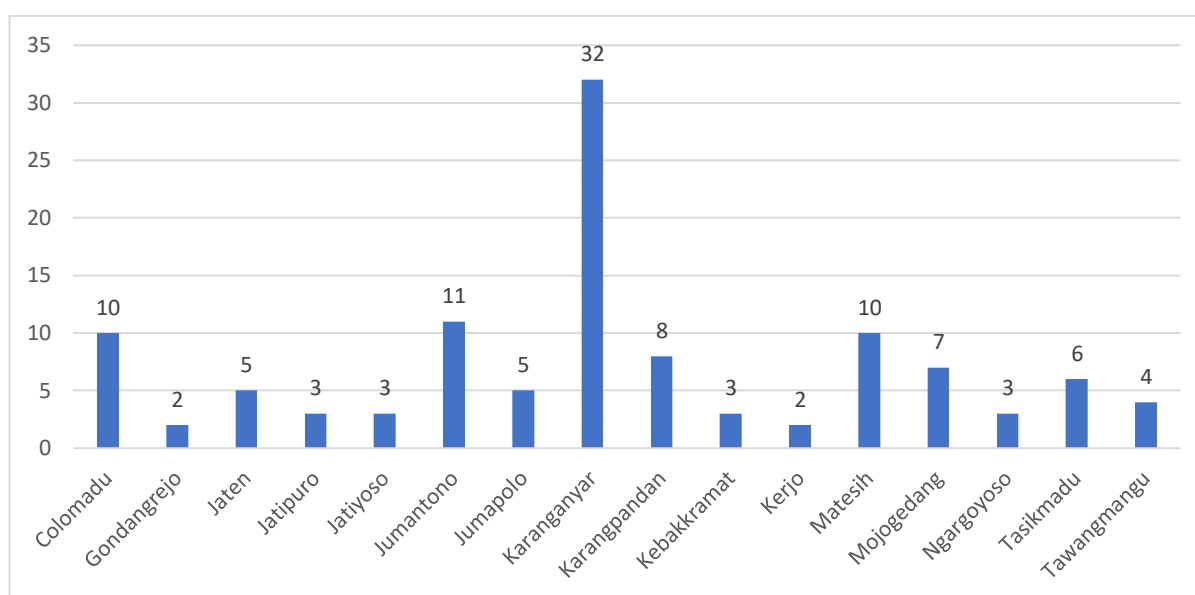
Responden menurut tingkat pendidikan



Tingkat pendidikan responden bervariasi, mulai dari lulusan SD hingga ada yang lulusan tingkat tertinggi, yaitu S3. Secara mayoritas, responden sudah memiliki pendidikan tinggi yaitu S1 ke atas, mencapai 67 persen. Jika digabungkan dengan lulusan SLTA, angkanya bisa mencapai 92 persen yang berarti bahwa secara pendidikan, para responden seharusnya sudah memiliki bekal tentang empat pilar, meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

C. Lokasi Tempat Tinggal

Responden menurut tempat tinggal



Menurut tempat tinggal atau domisili responden, terbanyak berasal dari Kecamatan Karanganyar yang merupakan ibukota dari Kabupaten Karanganyar. Adapun kecamatan lainnya memiliki representasi jumlah responden yang kecil, sehingga untuk penilaian implementasi empat pilar menurut kecamatan sebaiknya tidak dilakukan. Tahun depan, ketika jumlah sampel semakin banyak, perbandingan per kecamatan diharapkan sudah dapat dilakukan.

Secara lebih detail jumlah responden dan persentasenya pada kegiatan Survei Empat Pilar Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1.	USIA	< 20 THN	14	12.28 %
		21 – 30 THN	33	28.94 %
		31 – 40 THN	28	24.56 %
		41 – 50 THN	14	12.28 %
		> 50 THN	25	21.92 %

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
2.	PENDIDIKAN	SD	3	2.63 %
		SLTP	3	2.63 %
		SLTA	30	26.31 %
		S1	60	52.63 %
		S2	17	13.91 %
		S3	1	0.87 %
3.	DOMISILI	COLOMADU	10	8.77 %
		GONDANGREJO	2	1.75 %
		JATEN	5	4.38 %
		JATIPURO	3	2.63 %
		JATYOSO	3	2.63 %
		JUMANTONO	11	9.64 %
		JUMAPOLO	5	4.38 %
		KARANGANYAR	32	28.07 %
		KARANGPANDAN	8	7.01 %
		KEBAKKRAMAT	3	2.63 %
		KERJO	2	1.75 %
		MATESIH	10	8.77 %
		MOJOGEDANG	7	6.14 %
		NGARGOYOSO	3	2.63 %
		TASIKMADU	6	5.26 %
		TAWANGMANGU	4	3.50 %

4.2. Indeks Survei (Per Pilar)

Pengolahan data survei menggunakan excel dan diperoleh hasil sebagai berikut:

No Item	Jumlah Item	Skor	F	Jumlah Skor Rata-Rata	Persentase
1 Pancasila	15	SS	1277	5108	80.31446541
		S	398	1194	18.77358491
		KS	23	46	0.72327044
		STS	12	12	0.18867924
Jumlah			1710	6360	100
Skor Maksimal			6840		
Persentase Rata-Rata			92.98		
Kriteria			Sangat Baik		

No Item	Jumlah Item	Skor	F	Jumlah Skor Rata-Rata	Persentase
2 UUD 1945	15	SS	1000	4000	67.85411366
		S	521	1563	26.51399491
		KS	143	286	4.851569126
		STS	46	46	0.780322307
Jumlah			1710	5895	100
Skor Maksimal			6840		
Persentase Rata-Rata			86.18		
Kriteria			Sangat Baik		

No Item	Jumlah Item	Skor	F	Jumlah Skor Rata-Rata	Persentase
3 NKRI	15	SS	1133	4532	73.90737117
		S	494	1482	24.16829746
		KS	35	70	1.141552511
		STS	48	48	0.782778865
Jumlah			1710	6132	100
Skor Maksimal			6840		
Persentase Rata-Rata			89.65		
Kriteria			Sangat Baik		

No Item	Jumlah Item	Skor	F	Jumlah Skor Rata-Rata	Persentase
4 BTI	15	SS	1093	4372	70.97402597
		S	571	1713	27.80844156
		KS	29	58	0.941558442
		STS	17	17	0.275974026
Jumlah			1710	6160	100
Skor Maksimal			6840		
Persentase Rata-Rata			90.06		
Kriteria			Sangat Baik		

BAB V

ANALISIS HASIL SURVEI

5.1. Analisis Hasil Olah Data

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Pilar 1 Pancasila mendapatkan persentase rata-rata 92,98 dengan kriteria Sangat Baik.
2. Pilar 2 UUD 1945 mendapatkan persentase rata-rata 86,18 dengan kriteria Sangat Baik.
3. Pilar 3 NKRI mendapatkan persentase rata-rata 89,65 dengan kriteria Sangat Baik.
4. Pilar 4 Bhinneka Tunggal Ika mendapatkan persentase rata-rata 90,06 dengan kriteria Sangat Baik.

Berdasarkan hasil olah data di atas, dapat dikatakan sudah selaras dengan hasil Survei Empat Pilar yang dilaksanakan oleh MPR RI sebagai lembaga tertinggi yang diberi mandat untuk melaksanakan sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Adapun kondisi ke depan, kegiatan seperti ini harus terus dilakukan agar jati diri bangsa tidak luntur termakan modernisasi zaman.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas kegiatan maupun pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan pemahaman untuk masyarakat. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari pilar yang paling rendah hasilnya.

BAB VI

PENUTUP

Dalam melaksanakan tugas Survei Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara selama satu periode mulai September hingga Nopember 2022, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar, secara umum mencapai nilai dengan kriteria Sangat Baik.

Kuisisioner :**PILAR 1 PANCASILA**

1. Pancasila juga berfungsi sebagai Ideologi Negara.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
2. Bangsa Indonesia dibangun berdasarkan pada azas Pancasila.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
3. Cita-cita bangsa dan negara terkandung dalam Pancasila.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
4. Pancasila adalah ideologi bangsa yang bersifat terbuka artinya senantiasa bergerak seiring perkembangan zaman.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
5. Pancasila Sebagai Dasar Negara salah satu fungsinya adalah sebagai kepribadian bangsa.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
6. Pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila secara resmi disahkan Sebagai Ideologi Bangsa.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
7. Pancasila mengandung semangat musyawarah dan mufakat.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
8. Salah satu fungsi pokok Pancasila yaitu Pandangan Hidup Bangsa.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
9. Pancasila pertama kali dicetuskan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
10. Salah satu tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah Mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
11. Indonesia merupakan negara demokrasi, di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
12. Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa merupakan fungsi Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
13. Nilai-nilai yang sesuai dengan wawasan kebangsaan adalah cinta akan tanah air dan bangsa.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
14. Salah satu upaya untuk membina nasionalisme Indonesia adalah menghindari sikap intoleransi.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju

- Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
15. Melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan merupakan makna dari sila kedua.
- Sangat Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Tidak Setuju

PILAR 2 UUD 1945

1. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 tidak boleh diubah karena memuat tujuan negara.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
2. UUD Negara Republik Indonesia 1945 adalah pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
3. UUD Negara Republik Indonesia 1945 adalah sumber hukum segala peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
4. Semua peraturan yang ada di NKRI harus berpedoman kepada UUD Negara Republik Indonesia 1945.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
5. UUD Negara Republik Indonesia 1945 memiliki otoritas tertinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
6. Seluruh lembaga negara harus tunduk pada UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan penyelenggaraan negara juga wajib harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
7. Amandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945 tidak perlu dilakukan.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
8. Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga tinggi negara.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
9. DPD termasuk dalam lembaga tinggi negara.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
10. MPR adalah lembaga tinggi negara.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
11. Masa jabatan Presiden adalah 2 periode.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
12. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Utusan Golongan.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
13. Segala keputusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
14. Setelah amandemen, DPR masih lembaga tinggi negara.

- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Kurang Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
15. DPR berhak membuat Undang-Undang.
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Kurang Setuju
 - Sangat Tidak Setuju

PILAR 3 NKRI

1. NKRI merupakan suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan bermacam adat, suku, keyakinan serta budaya yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
 - Sangat Setuju
 - Setuju
 - Kurang Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
2. Manfaat kesatuan dan persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah keutuhan dan keamanan negara tetap terjaga.
 - Sangat Setuju
 - Setuju
 - Kurang Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
3. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan merupakan jiwa lahirnya NKRI karena menyadari tentang keragaman bangsa Indonesia.
 - Sangat Setuju
 - Setuju
 - Kurang Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
4. Unsur terbentuknya negara adalah : rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat dan pengakuan negara lain.
 - Sangat Setuju
 - Setuju
 - Kurang Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
5. Negara Indonesia mengakui dan menghormati atas keberagaman adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.
 - Sangat Setuju
 - Setuju
 - Kurang Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
6. Nilai kehidupan masyarakat dengan akar budaya kearifan lokal sangat menentukan keberhasilan proses pembauran bangsa.
 - Sangat Setuju
 - Setuju
 - Kurang Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
7. Posisi geografis Indonesia yang sangat menguntungkan dan sumber kekayaan alam yang potensial, disamping sebagai Rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, juga berpotensi timbulnya kerawanan dan ancaman dari pihak yang mempunyai kepentingan tertentu.
 - Sangat Setuju
 - Setuju
 - Kurang Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
8. Keutuhan wilayah, meliputi seluruh pulau dengan segenap tanah, air dan udara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.
 - Sangat Setuju
 - Setuju
 - Kurang Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
9. Keutuhan penduduk atau Sumber Daya Manusia (SDM), meliputi keutuhan orangnya, statusnya, keselamatan bahkan kesejahteraannya.
 - Sangat Setuju
 - Setuju
 - Kurang Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
10. Keutuhan khasanah budaya meliputi adat istiadat, karya cipta dan hasil pemikiran Bangsa Indonesia dan suku-suku di seluruh wilayah NKRI.
 - Sangat Setuju
 - Setuju
 - Kurang Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
11. Keutuhan Sumber Daya Alam (SDA), meliputi seluruh kekayaan alam berupa barang tambang, flora dan fauna beserta seluruh plasma nutfahnya.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju

- Setuju
- Sangat Tidak Setuju
- 12. Bentuk Negara Indonesia adalah Republik.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
- 13. Negara Kesatuan adalah bentuk negara yang bersifat tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan, tidak terbagi dan kewenangannya berada pada pemerintah pusat.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
- 14. Dalam negara kesatuan, kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemerintah pusat. Akan tetapi, ada beberapa daerah keistimewaan.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
- 15. Dalam negara kesatuan tidak ada istilah negara bagian.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Tidak Setuju

PILAR 4 BHINNEKA TUNGGAL IKA

1. Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam kitab Nagarakertagama.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
2. Istilah Bhinneka Tunggal Ika ada sejak zaman Mataram Hindu.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
3. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang harus dipertahankan oleh Bangsa Indonesia dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
4. Semboyan Bhineka Tunggal Ika sangat penting untuk mempersatukan bangsa Indonesia, mempertahankan kesatuan bangsa, meminimalisir konflik atas kepentingan pribadi atau kelompok.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
5. Bangsa Indonesia dan keragamannya baik dari segi agama, warna kulit, suku bangsa, bahasa, yang kemudian menjadikannya sebagai bangsa majemuk dan berdaulat.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
6. Ke-Bhinneka-an sebagai sebuah hakikat realitas yang sudah ada dalam bangsa, sedangkan ke-Tunggal-Ika-an merupakan cita-cita kebangsaan.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
7. Bhinneka Tunggal Ika adalah jembatan penghubung menuju terbentuknya Negara berdaulat.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
8. Berlaku adil terhadap terhadap siapapun (di sekolah, rumah, masyarakat) adalah contoh perilaku yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
9. Bhinneka Tunggal Ika secara tidak langsung merupakan gambaran nasionalisme bangsa Indonesia.
 - Sangat Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
10. Makna Bhinneka Tunggal Ika menjadi prinsip warga negara Indonesia untuk membangun nasionalisme.

- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Kurang Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
11. Contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Perilaku Inklusif (bahwa seseorang diharuskan tidak melihat dirinya lebih diutamakan dari kepentingan yang lain). Sama halnya dengan kelompok, dimana kepentingan bersama lebih diutamakan dari kepentingan pribadi atau golongan.
 - Sangat Setuju
 - Setuju
 - Kurang Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
 12. Ditinjau dari pada keanekaragamannya, maka sudah sepatutnya jika Indonesia menjadi bangsa dengan tingkat keanekaragaman terbesar di dunia. Hal ini pula yang menjadikan bangsa Indonesia disegani oleh bangsa lain. Namun jika tidak dipergunakan secara bijak, besar kemungkinan terjadinya disintegrasi dalam bangsa.
 - Sangat Setuju
 - Setuju
 - Kurang Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
 13. Perbedaan pendapat sesungguhnya merupakan hal yang lumrah, apalagi pada sistem demokrasi. Sistem tersebut kemudian menuntut rakyat bebas mengungkapkan pendapat masing-masing. Perbedaan pendapat tidak perlu dibesar-besarkan, namun harus dicari permufakatan yang mengedepankan kepentingan bersama.
 - Sangat Setuju
 - Setuju
 - Kurang Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
 14. Jika terdapat perbedaan yang ada pada antar kelompok maupun pribadi wajib dicari solusinya secara bersama-sama dengan musyawarah.
 - Sangat Setuju
 - Setuju
 - Kurang Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
 15. Contoh perilaku yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika adalah tidak diskriminasi terhadap siapapun.
 - Sangat Setuju
 - Setuju
 - Kurang Setuju
 - Sangat Tidak Setuju